

AIR MINUM - PENYEDIAAN - SISTEM - INDUK - RENCANA

2024

PERGUB NTT NO. 65, BD 2024/NO. 065

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM LINTAS KABUPATEN DI WILAYAH PULAU FLORES

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten di wilayah pulau Flores.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022 dan PP No. 122 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten di Wilayah Pulau Flores dengan menetapkan defenisi dan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Penetapan peraturan ini dimaksudkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota pada wilayah admininstrasi Pulau Flores yang disusun dengan memperhatikan kebijakan strategis daerah dan pedoman bagi Daerah dan semua pihak yang berperan dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah dengan Tujuan Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di Provinsi NTT, Menyelenggarakan sistem fisik dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan sarana dan prasarana dan sarana sanitasi dan Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan dasar bagi manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Diatur tentang Jangka waktu RISPAM Regional Wilayah Pulau Timor ditetapkan untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) Tahun dan ditinjau 5 (lima) tahun sekali oleh kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Diatur juga tentang Jangka waktu, Penyelenggaraan, pengawasan dan pemantauan dan Sistematika Rispam Regional Pulau Flores. Dokumen Rispam Regional Wilayah Pulau Flores terdiri dari 9 (sembilan)Bab dengan rincian sebagai berikut : Pendahuluan; Gambaran umum Kabupaten/Kota di Wilayah Pulau Flores; Kondisi SPAM eksisting, Standar/Kriteria perencanaan; Proyeksi kebutuhan air; Potensi air baku; Rencana induk dan pra desain penyelenggaraan SPAM; Analisis keuangan dan Penyelenggaraan kelembagaan pelayanan air minum.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 November 2024